

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara demokrasi, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin pada tingkatan daerah sebagai syarat meneruskan estafet pemerintahan. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal I (1) UU Nomor 22 Tahun 2007)

Pilkada yang juga merupakan sebuah pemilihan umum, sekarang berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, seperti pada pemilu 1955 dan pemilu pada masa orde baru, pemilihan umum sekarang merupakan pemilihan langsung, yang artinya rakyat langsung memilih calon pemimpin yang disukai sesuai dengan hati nuraninya. Dengan model pemilu langsung, pilkada menjadi sebuah lanjutan model dari pencarian sosok pemimpin rakyat pada tingkat lokal yang merupakan adopsi dari pencapaian pesta demokrasi yang telah dilalui dengan sukses pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tahun 2004.

Azas langsung umum, bebas, dan rahasia serta jujur adil (Luber Jurdil) dalam penyelenggaraannya memberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya, Haris G. Werren mengungkapkan pemilu merupakan kesempatan bagi warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat

pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga Negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki. (Haryanto, 2004 : 81)

Pada tahun 2005 bangsa Indonesia telah melaksanakan pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak hampir disebagian besar kabupaten/kota serta beberapa provinsi di Indonesia. *One persen one vote* sebagai landasan dalam pemungutan dan perhitungan suara pada pilkada langsung tersebut membutuhkan partisipasi setiap individu masyarakat yang tidak dibedakan oleh status maupun kedudukan, sehingga prinsip persamaan dan keadilan senyatanya telah dijujung tinggi demi terselenggaranya pilkada secara demokratis.

Sejumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia telah menyelenggarakan Pilkada Langsung, termasuk juga Kota Bandar Lampung. Pesta demokrasi Kepala Daerah secara langsung di Kota Bandar Lampung tersebut untuk pertama kalinya telah diselenggarakan pada 30 Juni 2010 dengan jumlah total pemilih mencapai 370.031 (Sumber data : KPUD Bandar Lampung 2010).

Peserta pilkada adalah padangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik mengacu pada PP Nomor 06 Tahun 2005, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dapat mengusulkan pasangan calonnya apabila telah memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dan partai politik atau gabungan partai politik tersebut hanya dapat mengajukan satu pasangan calon yang kemudian diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk proses lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka partai politik dijadikan “perahu” yang dijadikan sarana kandidat untuk membawa pasangan calon ke bursa pemilihan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk di umumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;

- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung,, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Penulis menekankan pada poin o yaitu salah satu syarat calon kepala daerah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan yang sama dan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah, dengan persyaratan yang ada pada poin 0, maka pejabat kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah disebut *incumbent* (Media Indonesia, edisi 1 Juli 2007)

Untuk memenangkan Pemilihan kepala Daerah langsung seperti yang sudah berlangsung pada Kota Bandar Lampung jelas akan menuntun persaingan partai politik yang sangat ketat, berbagai upaya dilaksanakan oleh partai politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut. Setiap upaya memperkenalkan calon, mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk ikut mendukung dan memilih calon yang diusung.

Kemenangan pasangan calon yang dinilai berbagai pihak diluar dugaan karena pasangan yang cukup diunggulkan dan diusung partai-partai besar justru

mengalami kegagalan dalam memenangkan pilkada tersebut. Pasangan-pasangan yang memiliki popularitas yang sudah lama melekat dibenak masyarakat harus menerima kenyataan kekalahan dari kandidat lainnya. Kandidat-kandidat yang masih baru dan kurang diandalkan justru meraih kesuksesan dalam menarik dukungan dan suara dari masyarakat. (Lampung Post, 21/04/2008)

Selain di Lampung, daerah lain yang sudah melaksanakan pilkada juga tidak luput dari fenomena tentang kekalahan calon yang diusung oleh partai-partai besar. ini juga menjadi hal yang menarik pada pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung yang sudah berlangsung tahun 2010. Dalam pilwakot tersebut beberapa partai politik yang ikut dan bersaing diantaranya adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PKS dan partai kecil lainnya, juga partai pemenang pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung. Adapun calon yang diusung partai-partai tersebut yang ikut dalam pilwakot Kota Bandar Lampung tanggal 30 Juni adalah sebagai berikut :

Table 1. Daftar Pasangan Calon Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010.

No (1)	Pasangan Calon (2)	Partai Politik Yang Mecalonkan (3)
01	Ir. Hi. A. Sauki Shobier, SH dan Syamsul Rizal, SH, MH	PERSEORANGAN
02	Drs. Hi. Herman HN, MM dan Hi. Tobroni Harun, ST, MM	PDIP, PNBK, PBR, PKNU, PK, PBB, PNI MARHENISME, PIS, PIB, BARNAS, Republikan, PDP, Patriot, Merdeka, PPD, PAKARPANGAN, PKPI, PPNUI, PSI, Pelopor, Partai Buruh
03	Herlani, SE, MM Heru Sambodo, ST	GOLKAR, HANURA, PKB, PPRN, PMB, PKDI, PDS
04	Drs. Hi. Eddy Sutrisno, M.Pd dan Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si	DEMOKRAT, PKS, PPP, GERINDRA, PAN, PDK, PKPB, PPI

1	2	3
05	Dhomiril Hakim YHS, SH dan Sugiato, S.Pd	PERSEORANGAN
06	Drs. Hi. Nurdiono, SE, MM, Akt dan Ir. Hi. Dian Kurnia Laratte	PERSEORANGAN

Sumber data : KPU Bandar Lampung 2010.

Pilkada yang diikuti oleh beberapa partai besar seperti Golkar, Demokrat, PKS dan PDIP tersebut ternyata justru dimenangkan oleh pasangan Herman HN dan Tobroni Harun dari koalisi sejumlah partai dengan perolehan suara sebanyak 122.883 (34,35%). Disusul perolehan suara Hi. Kherlani, S.E., M.M. dan MW. Heru Sambodo, S.T. yang diusung Partai Golkar dan Partai koalisi lainnya dengan memperoleh suara 107.133 (29,86%). Kemudian disusul pemenang Pilwakot 2004 Drs. Hi. Eddy Sutrisno, M.Pd yang mencalonkan kembali pada Pilkada 2010 yang berpasangan dengan Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si yang diusung Partai Demokrat dan Partai Koalisi dengan memperoleh 104.227 suara (29,05%). Di posisi ke empat yaitu Drs. Hi. Nurdiono, SE, MM, Akt dan Ir. Hi. Dian Kurnia Laratte dengan perolehan 10.026 suara (2,79%). Kelima dimenangkan oleh Dhomiril Hakim YHS, SH dan Sugiato, S.Pd yang mencalonkan diri secara *independent* dengan memperoleh 7.904 suara (2,20%). Perolehan suara paling sedikit dengan memperoleh 6.618 suara (1,84%) yaitu pasangan Ir. Hi. A. Sauki Shobier, SH dan Syamsul Rizal, SH, MH yang mencalonkan secara *independen*. Total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah

356.708 suara, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) berjumlah 271.246suara.

Dibawah ini akan dijelaskan tabel yang menggambarkan perolehan suara masing-masing calon pada pilkada kota Bandar Lampung 2010.

Tabel 2. Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon Walikota pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010.

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
01	Ir. Hi. A. Sauki Shobier, SH dan Syamsul Rizal, SH, MH	6.618	1,83%
02	Drs. Hi. Herman HN, MM dan Hi. Tobroni Harun, ST, MM	122.883	34,35%
03	Herlani, SE, MM Heru Sambodo, ST	107.133	29,86%
04	Drs. Hi. Eddy Sutrisno, M.Pd dan Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si	104.227	29,05%
05	Dhomiril Hakim YHS, SH dan Sugiato, S.Pd	7.904	2,20%
06	Drs. Hi. Nurdiono, SE, MM, Akt dan Ir. Hi. Dian Kurnia Laratte	10.026	2,79%
	JUMLAH	358.791	100%

Sumber data : KPUD Bandar Lampung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Faktor-faktor Penyebab Kekalahan *Incumbent* Edy Sutrisno pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2010.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Kekalahan *Incumbent* Edy Sutrisno Pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2010.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian adalah :

1. Dari hasil penelitian ini penulis mampu mengetahui faktor-faktor penyebab kekalahan *Incumbent* Edy Sutrisno pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2010 dan menjadi panduan dalam menganalisis fenomena politik kekalahan *Incumbent* pada Pilwakot di daerah lainnya.
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan masukan bagi pembaca untuk mengetahui tentang fenomena kekalahan seorang *Incumbent* dalam sebuah pemilihan, khususnya tentang kekalahan *Incumbent* pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2010.